



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT  
**UNIT KERJA** : DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : LA ODE ALI KADIRUN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 776679

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **2.400.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.200 m2/150 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, WARISAN Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 325 m2/144 m2 di KAB / KOTA MUNA, WARISAN Rp. 650.000.000
3. Tanah Seluas 2.687 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 8.969 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 550 m2 di KAB / KOTA MUNA, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
6. Tanah Seluas 14.380 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, WARISAN Rp. 100.000.000
7. Tanah Seluas 16.530 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, WARISAN Rp. 100.000.000
8. Tanah Seluas 14.880 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, WARISAN Rp. 100.000.000
9. Tanah Seluas 50.000 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, WARISAN Rp. 520.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **4.500.000**



1. MOTOR, YAMAHA 5 BP-Z SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL  
SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.290.287
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.414.790.287
III. HUTANG	Rp.	157.675.831
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.257.114.456

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.